

# KAJIAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN JALAN DI KABUPATEN BIMA DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Oleh :

S U W A N D I

## ABSTRAK

Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung perkembangan kegiatan perekonomian wilayah. Tersebar nya lokasi baik sumber alam, tempat produksi, pasar, maupun konsumen akhir menuntut adanya sistem pelayanan distribusi yang efisien. Salah satu arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Bima adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi potensi ekonomi daerah serta membuka wilayah. Namun di dalam implementasinya, Pemkab Bima mempunyai kendala dalam penyediaan alokasi dana penanganan jalan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan kondisi jalan yang mantap 100%. Salah satu pendekatan yang perlu dilakukan untuk menentukan pembagian alokasi dana yang terbatas tersebut bagi masing-masing kecamatan di Kabupaten Bima adalah dengan menggunakan produksi komoditas unggulan sebagai dasar perhitungan manfaat jalan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan komoditas unggulan dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya dan selama ini sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi angka PDRB Kabupaten Bima.

Berangkat dari kondisi tersebut maka diperlukan adanya suatu analisa terhadap pengalokasian pembiayaan penanganan jalan secara proporsional untuk setiap kecamatan. Dalam penulisan tesis ini, analisa tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara aspek manfaat dari nilai produksi untuk setiap komoditas unggulan masing-masing kecamatan dengan kebutuhan investasi untuk penanganan jalan pada kecamatan tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut adalah didapatnya nilai Benefit Cost Ratio (BCR). Bobot dari nilai BCR tersebut bersama dengan bobot panjang jalan setiap kecamatan akan menghasilkan suatu koefisien alokasi biaya penanganan jalan untuk setiap kecamatan yang selanjutnya akan menjadi faktor pengali dalam menentukan alokasi dana bagi kecamatan tersebut dengan melihat alokasi dana yang tersedia dalam APBD Kabupaten Bima. Dari analisa permodelan yang dilakukan dalam penulisan tesis ini, Kecamatan Belo mendapatkan porsi alokasi biaya penanganan jalan terbesar yaitu 30.90%, sehingga dengan alokasi dana penanganan jalan dalam APBD Kabupaten Bima Tahun 2007 sebesar Rp. 18.065.000.000 Kecamatan Belo mendapat alokasi dana sebesar Rp. 5.582.321.902,99. Sedangkan Kecamatan Bolo mendapatkan porsi alokasi terkecil yaitu 0.05% dan mendapatkan alokasi anggaran hanya sebesar Rp. 8.606.727,27.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa: kecamatan dengan tingkat produktifitas komoditas unggulan terbesar mempunyai nilai BCR dan angka koefisien alokasi biaya yang terbesar, produktifitas komoditas unggulan sangat menentukan besarnya alokasi biaya penanganan jalan. Dengan adanya keterbatasan kemampuan pembiayaan tersebut penelitian ini merekomendasikan hendaknya; pengalokasian biaya penanganan jalan harus mampu mendukung simpul-simpul pelayanan komoditas unggulan mulai dari produksi sampai dengan pemasarannya dengan jalan menyusun skala prioritas masing-masing kecamatan. Untuk mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya Pemerintah Kabupaten Bima harus segera melakukan alih status beberapa ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi serta mempercepat terwujudnya kawasan sentra produksi komoditas unggulan,

sehingga dapat mendongkrak angka produksi komoditas unggulan yang pada akhirnya dapat menaikkan nilai manfaat jalan pada kecamatan yang bersangkutan.

**Kata kunci:** komoditas unggulan, *benefit cost ratio*, dan koefisien alokasi biaya

## ABSTRACT

*Roads as part of transportation system has important role in supporting development of regional economic activities. The distributed area either natural resource, production, market, or third-customer are totally lack of efficiently distribution service. One of development policy direction in Bima Regency was infrastructure developmental acceleration that directed to improve mobility and distribution of regional economic potencies and routing of isolated areas. But, in its implementation, the regional government of Bima has little limitation in supplying budgeting allocation for route management which concordance with a 100% road condition. An approach that should be conducted to determine such limited budgeting for each district in Bima Regency was by using primary production commodities as basic of route benefits. Since, the development of primary commodity can mobilize others sectors and recently, it is true, that agricultural become the greatest income for PDRB of Bima Regency.*

*By considering the condition, it is necessity to make an analysis toward budgeting allocation for a route management that proportionally to each district. In this thesis arrangement, such analysis was conducted by comparing between beneficial aspects of production value for each primary commodity of its district toward investment demand for the route management of the district. The result of such comparative was yielded Benefit Cost Ratio value (BCR). The weight of BCR combined by weight of road length for each district can yielded a coefficient of cost for road management allocation to each district which then becomes multiplication factor in determining budgeting allocation to the district by considering the supported APBD of Bima regency. From the modelling analysis conducted in this thesis arrangement, the Belo district has greatest part budgeting allocation for road management, that was 30.90%, hence, the budgeting allocation for road management in APBD of Bima Regency of 2007 was Rp. 18.065.000.000 that Belo district got Rp. 5.582.321.902,99. Whilst, Bolo district revealed the smallest allocation that was 0.05% that as sum of money was Rp. 8.606.727,27.*

*Based of the study result, it was concluded that: a district with bigger primary commodity productivity rate has the greatest BCR value and highest cost coefficient for budgeting allocation, which the primary commodity productivity would determine the sum of money of budgeting allocation for road management. Since the limitation of budgeting ability, it is recommended that budgeting allocation for road management should be able to support nodes of primary commodity services from production to its marketing by arranging priority scale for each district. Therefore, to support other budgeting resources, Government of Bima Regency shall immediately taking over for status of several route by altering to provincial grade and accelerating manifested primary commodity production centres, to lift the number o primary commodity production that finally may increase benefit value of roads in the districts.*

**Keywords:** *superior commodity, benefit cost ratio, and coefficient of cost ratio*